

## STRATEGI PENGAMANAN JALUR LAUT TERHADAP ANCAMAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

\*Nugroho Ibra Marsoes<sup>1</sup> & Muhammad Arsy Ash Shiddiqy<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Email Korespondensi: nugrohoibramarsoes@student.uir.ac.id

### ABSTRACT

*Transnational drug trafficking via sea routes is a form of transnational crime that is becoming increasingly complex and poses a serious threat to national and regional security, particularly in Southeast Asia. This study aims to examine and analyze the maritime security strategies implemented by Indonesia and Malaysia in combating cross-border drug trafficking, as well as to evaluate the effectiveness of bilateral cooperation in combating this crime. The primary reason for conducting this research is the high intensity of drug smuggling activities in border waters that remain largely unmonitored, coupled with the lack of systematic coordination among transnational security agencies. This study uses liberalism theory as its primary approach, with the concept of maritime security as the analytical foundation for the strategies implemented by each country. The research method used is descriptive qualitative with literature review techniques. The research subject is the maritime security strategies of Indonesia and Malaysia, while the research object includes policies, institutions, and forms of cross-border cooperation. The information in this study was obtained from official documents (BAKAMLA, BNN, MMEA), UNODC and ASEAN-NARCO reports, and academic journals. Data collection techniques were carried out through a review of relevant documents and literature, and analyzed using thematic reduction, comparative analysis, and data verification. The research findings indicate that security strategies in Indonesia are multi-stakeholder in nature and tend to involve overlapping authorities, while Malaysia's approach is more centralized through the MMEA. Bilateral cooperation initiatives such as Patkor Malindo, intelligence sharing, and ASEAN forums represent positive steps, but their effectiveness remains hindered by policy differences, technological limitations, and the absence of a unified command mechanism.*

***Keywords: Maritime Security, Drug Trafficking, Indonesia, Malaysia, Security Strategy, Bilateral Cooperation.***

### PENDAHULUAN

Peredaran narkoba lintas negara melalui jalur laut merupakan fenomena yang terus mengalami peningkatan dan menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional serta stabilitas kawasan Asia Tenggara. Wilayah perairan seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan pesisir Kalimantan yang berbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia menjadi titik rawan yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional. Modus penyelundupan yang kompleks seperti penggunaan kapal cepat, menonaktifkan sistem pelacakan AIS, dan pertukaran muatan di laut menunjukkan bahwa jalur laut semakin diandalkan oleh jaringan kriminal sebagai sarana distribusi narkoba. Selain menimbulkan kerugian sosial, penyelundupan narkoba berdampak pada integritas hukum, ketahanan nasional, dan hubungan antarnegara.

Situasi ini menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi strategi pengamanan laut yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia, dua negara kepulauan yang memiliki karakteristik geografis yang rentan namun strategis. Dalam konteks hubungan bilateral, tantangan koordinasi dan harmonisasi prosedural sering kali menjadi penghalang efektivitas kerja sama. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif terhadap pendekatan kebijakan, kelembagaan, dan kerangka kerja sama yang diterapkan

oleh masing-masing negara serta bagaimana strategi tersebut saling berinteraksi dalam menanggulangi ancaman narkoba lintas batas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi pengamanan jalur laut yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia terhadap ancaman peredaran narkoba lintas negara, serta mengevaluasi efektivitas kerja sama bilateral yang telah terbangun. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari pendekatan masing-masing negara, diharapkan penelitian ini dapat merumuskan rekomendasi strategis yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi pengamanan jalur laut yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia serta sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah dan menanggulangi ancaman peredaran narkoba lintas negara?

Perkembangan penelitian terdahulu menunjukkan adanya perhatian akademik terhadap strategi keamanan maritim dan penanggulangan narkoba lintas batas, namun belum secara khusus mengkaji komparasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Pandey (2023) mengusulkan klasifikasi ancaman maritim berdasarkan tingkat urgensi sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas negara. Kumara (2020) menyoroti pentingnya intervensi strategis dan teknologi MDA dalam konteks Sri Lanka. Hartono & Bakharuddin (2023) serta Guyana & Basuki (2024) menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sinergi institusional menjadi hambatan utama pengamanan laut di Indonesia. Studi oleh Putri & Margaret (2024) menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis komunitas pesisir, sementara Ramadhan et al. (2023) menekankan pentingnya sekuritisasi isu narkoba dalam kerangka keamanan non-tradisional di Asia Tenggara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang mengkaji struktur strategi dan efektivitas kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia secara mendalam dalam menghadapi tantangan narkoba maritim.

Liberalisme adalah pendekatan teoritis dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara, keberadaan institusi internasional, dan interdependensi sebagai kunci mewujudkan keamanan kolektif (Dunne et al., 2021; Börzel & Zürn, 2021). Pendekatan ini beranggapan bahwa negara-negara tidak selalu harus berkompetisi, melainkan dapat membangun perdamaian dan stabilitas melalui dialog, institusi bersama, dan transparansi kebijakan. Dalam konteks keamanan laut, liberalisme memberikan landasan teoritis terhadap pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi penyelundupan narkoba sebagai ancaman non-tradisional. Gagasan Immanuel Kant mengenai perdamaian abadi, serta pemikiran Keohane dan Nye tentang interdependensi kompleks, memperkuat pendekatan diplomatik, rezim kerja sama, dan interoperabilitas kelembagaan sebagai elemen penting dalam keamanan maritim bilateral.

Keamanan maritim merupakan konsep yang melibatkan perlindungan wilayah laut dari berbagai ancaman non-tradisional seperti penyelundupan narkoba, perompakan, dan perdagangan ilegal (Lingqun, 2023). Konsep ini mencakup empat dimensi utama: keamanan nasional maritim, kejahatan maritim, keselamatan pelayaran, dan ketahanan lingkungan laut. Dalam pengamanan jalur laut terhadap narkoba, keamanan maritim tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau jumlah kapal patroli, tetapi juga kemampuan sistem deteksi dini, pelibatan masyarakat, penggunaan teknologi, serta harmonisasi kebijakan lintas negara. Upaya seperti penguatan radar pantai, implementasi MDA (Maritime Domain Awareness), dan integrasi informasi antar lembaga menjadi bagian dari arsitektur keamanan maritim yang efektif dalam menghadapi ancaman penyelundupan narkoba.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, bertujuan untuk menganalisis strategi pengamanan jalur laut terhadap ancaman peredaran narkoba di Indonesia dan Malaysia serta mengevaluasi efektivitas kerja sama bilateral yang dilakukan kedua negara. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena mengkaji fenomena sosial-politik dan kerja sama keamanan maritim melalui interpretasi dokumen dan literatur yang relevan tanpa melakukan pengujian hipotesis. Subjek penelitian adalah strategi pengamanan laut dan bentuk kerja sama bilateral yang dibangun antara Indonesia dan Malaysia, sementara objeknya meliputi kebijakan keamanan maritim, kelembagaan nasional, dan mekanisme operasional dalam pengawasan wilayah laut. Lokasi penelitian secara faktual berada di lingkungan akademik Universitas Islam Riau, khususnya pada Program Studi Hubungan Internasional, sedangkan secara substansi mencakup kawasan perairan strategis di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Kalimantan Barat yang merupakan titik rawan aktivitas penyelundupan narkoba. Penelitian ini tidak menggunakan informan langsung, melainkan menerapkan teknik purposive sampling terhadap data sekunder, seperti jurnal akademik 10 tahun terakhir, laporan resmi dari UNODC, BNN RI, MMEA, TNI AL, Bakamla, dan dokumen kerja sama seperti Patkor Malindo serta protokol ASOD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah sumber tertulis seperti laporan kebijakan, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, dan publikasi media kredibel yang relevan dengan fokus kajian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang dilakukan melalui proses kategorisasi tematik, interpretasi kebijakan dan strategi, serta penyusunan sintesis analitis mengenai efektivitas dan tantangan kerja sama bilateral dalam pengamanan laut terhadap peredaran narkoba lintas batas negara.

## PEMBAHASAN

### Strategi Pengamanan Jalur Laut Indonesia dan Malaysia terhadap Ancaman Narkoba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengamanan laut yang diterapkan Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan struktural yang berbeda namun berorientasi pada tujuan yang sama: mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba lintas negara. Di Indonesia, strategi bersifat multi-lembaga yang melibatkan TNI AL, Bakamla, Polairud, dan Bea Cukai. Koordinasi antarinstansi sering kali mengalami kendala tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi sistem komando, sehingga respons terhadap ancaman penyelundupan sering tidak optimal.

Sebaliknya, Malaysia melalui Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) menerapkan sistem pengamanan yang lebih terpusat dan terpadu. Meski pendekatan ini efisien dalam hal kontrol dan komando, kelemahan dari sisi jumlah personel dan jangkauan operasional di wilayah Sabah dan Sarawak menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana disampaikan oleh Kumara (2020) dalam kajiannya mengenai pencegahan penyelundupan heroin di Sri Lanka, bahwa “pengamanan laut yang strategis membutuhkan intervensi teknologi dan perluasan jaringan personel terlatih di titik-titik perairan yang rentan.”

Efektivitas strategi juga diuji melalui keberadaan kerja sama bilateral seperti Patkor Malindo, yang sejak awal 2000-an menjadi simbol komitmen kedua negara dalam patroli terkoordinasi. Namun, kajian oleh Guyana & Basuki (2024) mengungkapkan bahwa efektivitas patroli lintas batas tidak hanya ditentukan oleh frekuensi operasi, tetapi juga oleh interoperabilitas sistem komunikasi antar instansi dan keseragaman prosedur penindakan di laut.

### **Efektivitas Kerja Sama Bilateral dan Tantangan Implementasi**

Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang keamanan maritim pada dasarnya telah memiliki fondasi kuat melalui koordinasi militer, forum regional ASEAN, serta pertukaran informasi antara instansi nasional seperti BNN dan AADK. Namun dalam praktiknya, implementasi masih menghadapi kendala teknis dan politis. Berbagai laporan seperti dari Ramadhan et al. (2023) menunjukkan bahwa tantangan terbesar ada pada pelaksanaan teknis lapangan, terutama dalam penyusunan SOP gabungan, integrasi sistem radar dan AIS, serta harmonisasi hukum penyelundupan laut lintas yurisdiksi.

Penelitian terdahulu oleh Putri Syah & Margaret (2024) juga memperkuat hasil ini dengan menggarisbawahi bahwa kolaborasi antarinstansi di Indonesia seperti BNN, POLRI, dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sabu lintas wilayah perairan Malaysia–Tanjung Balai Medan melalui pendekatan berbasis masyarakat dan operasi interdiksi komunitas. Efektivitas pengamanan laut menjadi lebih optimal ketika masyarakat pesisir turut dilibatkan sebagai mitra deteksi dini.

### **Kompleksitas Penyelundupan dan Upaya Pencegahan**

Modus operandi penyelundupan narkoba semakin canggih, seperti penggunaan kapal niaga, flag hopping, penonaktifan AIS, dan transfer muatan di laut terbuka. Data dari UNODC menunjukkan bahwa 64% penyelundupan narkoba internasional terjadi melalui kapal kontainer. Dalam konteks kawasan, jalur laut seperti Selat Malaka dan Laut Natuna merupakan titik transit utama yang sulit diawasi secara menyeluruh. Penelitian oleh Hartono & Bakharuddin (2023) menekankan pentingnya integrasi sistem radar dan pertukaran informasi real-time sebagai langkah pencegahan. Mereka menyatakan bahwa “tanpa sistem deteksi terintegrasi, upaya pemantauan akan selalu tertinggal dibandingkan kecepatan adaptasi para pelaku kejahatan.”

Di Malaysia, pendekatan hukum yang ketat seperti Undang-Undang Dadah Berbahaya memberikan ancaman hukuman maksimal bagi pelaku penyelundupan. Namun harmonisasi hukum dan prosedur penanganan antarnegara masih menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk menghindari proses peradilan.

### **Penguatan Strategi Berbasis Komunitas dan Teknologi Maritim**

Pelibatan masyarakat pesisir menjadi strategi alternatif yang semakin relevan di Indonesia, sejalan dengan pendekatan liberalisme yang menempatkan aktor non-negara sebagai elemen penting dalam keamanan kolektif (Dunne et al., 2021). Model pengawasan berbasis komunitas seperti yang diterapkan di Kepulauan Riau dan Kalimantan menunjukkan efektivitas dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat sistem pelaporan aktivitas mencurigakan.

Lebih lanjut, integrasi teknologi melalui Maritime Domain Awareness (MDA) menjadi kebutuhan mendesak bagi kedua negara. Lingqun (2023) menyampaikan bahwa keamanan maritim modern harus dibangun di atas sistem deteksi cerdas dan analisis berbasis data real-time yang menggabungkan satelit, radar, AIS, dan pelaporan masyarakat. Tanpa itu, sistem pengamanan laut akan terus kalah dari dinamika ancaman lintas batas.

### **Posisi Teoritis dan Kebaruan Temuan**

Pembahasan ini secara teoritik memperkuat perspektif liberalisme sebagai landasan analitis utama dalam menjelaskan urgensi kerja sama Indonesia–Malaysia. Keamanan tidak dapat diwujudkan secara unilateral, melainkan melalui interdependensi dan institusi bersama. Studi ini juga menunjukkan

kebaruan dalam pendekatan komparatif bilateral, khususnya dalam analisis kelembagaan, efektivitas strategi, dan adaptasi teknologi maritim yang belum banyak dikaji dalam literatur terdahulu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa strategi pengamanan jalur laut yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi ancaman peredaran narkoba lintas negara memiliki persamaan dalam orientasi dan tujuan, namun berbeda dalam struktur kelembagaan dan efektivitas pelaksanaannya.

Di Indonesia, strategi pengamanan laut melibatkan banyak institusi seperti Bakamla, TNI AL, Polairud, dan Bea Cukai. Pendekatan multisektor ini mencerminkan upaya kolaboratif, namun menghadapi tantangan serius dalam hal tumpang tindih kewenangan, koordinasi yang lemah, serta keterbatasan teknologi dan personel. Sementara itu, Malaysia menerapkan strategi pengamanan laut yang lebih terpusat melalui MMEA. Meskipun struktur ini dinilai lebih efisien dalam hal koordinasi internal, namun keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah pengawasan tetap menjadi hambatan utama.

Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia melalui program Patkor Malindo, pertukaran data intelijen, dan forum regional seperti ASEAN Maritime Forum telah menunjukkan komitmen kedua negara dalam menangani peredaran narkoba secara bersama. Namun, efektivitas kerja sama ini masih terbatas oleh perbedaan sistem hukum, mekanisme operasional, dan kapasitas institusional. Oleh karena itu, strategi pengamanan jalur laut kedua negara belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyelundupan narkoba lintas negara.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa keamanan maritim dalam konteks penyelundupan narkoba adalah bagian dari tantangan keamanan non-tradisional yang membutuhkan pendekatan kolaboratif antarnegara. Teori liberalisme dalam hubungan internasional menjadi landasan penting dalam menjelaskan urgensi kerja sama bilateral dan regional untuk mewujudkan keamanan maritim yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, U., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). *Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan*. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 486–487.
- Börzel, T. A., & Zürn, M. (2021). *Contestation and constitution of global governance: A theoretical framework*. *Global Constitutionalism*, 75(2), 282–305. <https://doi.org/10.1017/S0020818320000570>
- Challoumis, C. (2024). *Shortcuts from Liberalism to the First World War*. *Pindus Journal of Culture Literature and ELT*, 4(3), 1–14. <https://doi.org/10.51699/literature.v4i3.1>
- Daddow, O. (2017). *International relations theory*. London: Sage Publications. <https://books.google.co.id/books?id=M-tWDgAAQBAJ>
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (Eds.). (2021). *International relations theories: Discipline and diversity* (5th ed.). Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=D8oQEAAAQBAJ>
- Jelita, R., Prasetya, I., & Ramadhan, R. (2023). Teori Belajar Behavioristik. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 404–411.
- Kapitonenko, N. (2022). *International Relations Theory*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=aTRYEAAAQBAJ>
- Kumara, A. (2020). *Sri Lanka Navy's role in heroin trafficking prevention and emerging drug trends: Strategic*

- maritime interventions and early prevention*. World Journal of Advanced Research and Reviews, 16(2), 355–363.
- Margareta, M., & Fransiska, D. (2024). Intelektiva Krisis Keamanan Di Ekuador: Tantangan Politik Dalam Menghadapi Konflik Bersenjata Dengan Geng Narkoba. *Kultura Digital Media*, 6(2), 62–71. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1044>
- Paul, T. V. (2021). Globalization, deglobalization and reglobalization: Adapting liberal international order. *International Affairs*, 97(5), 1599–1620. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab072>
- Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). *Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara*. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 5(1), 12–33. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v5i1.120>
- Usman, M., Khan, A., & Amjad, S. (2021). *Implications of Transnational Crime on Maritime Jurisdiction and Enforcement*. December 2023.
- Yuliyanti, L., Djemat, Y. O., Panorama, A. D., Studi, P., Hubungan, I., Politik, I., Jenderal, U., & Yani, A. (2025). Kerja Sama Indonesia dan Thailand Dalam Mengatasi Kasus Narkotika di Indonesia Tahun 2021-2023. 02(01).